



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)
Tahun 2020**



**Rumah Sakit Jiwa
Prof. HB. Saanin Padang**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Saanin Padang.

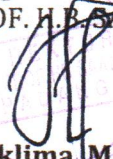
Laporan ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada rumah sakit selama Tahun 2020, yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Saanin Padang terhadap masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Sumatera umumnya.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun 2020 ini dapat memberikan kontribusi sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja, serta sebagai pendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa. Disamping itu Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dimasa mendatang atas kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang, sehingga upaya pencapaian kinerja dan cakupan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penyusunan buku laporan ini dimasa mendatang.

Demikianlah Laporan ini dibuat dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Amin.

Padang, Januari 2021
RS JIWA PROF. H.B. SAANIN PADANG


dr. Aklima MPH
NIP. 19680203 200212 2 002

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM	1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH	2
1. Kondisi Geografis Daerah	2
2. Gambaran Umum Demografis	2
3. Sejarah Singkat RS Jiwa Prof. HB. Saanin	3
4. Profil Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa`anin Padang	4
II. CAPAIAN KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	8
2.1.1 Indikator Kinerja Outcome	8
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	9
III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	11
IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
A. Prioritas urusan wajib yang dilaksanakan	12
B. Tingkat pencapaian kinerja pelayanan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.....	25
C. Tingkat pencapaian target estandar pelayanan minimal	26
D. Pencapaian indikator program dan kegiatan	29
E. Pencapaian kegiatan APBD.....	29
F. Alokasi dan realisasi anggaran	41
G. Permasalahan dan solusi	43
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	45
LAMPIRAN : I.2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan	

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan Rumah Sakit UPTD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan klasifikasi **Kelas "B"** dan kapasitas **273 Tempat Tidur**, yang aturan pokok operasionalnya mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. PP. Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Permendagri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 7 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 6 Tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 440-538-2011 Tentang Penetapan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
19. Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada BLUD RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara dan 3° 30' Lintang Selatan serta 98°36' dan 101°53' Bujur Timur, tercatat memiliki luas daerah sekitar 42,2 ribu km² atau 2,17 % dari luas Republik Indonesia, Letak Geografis Sumatera Barat berada pada garis khatulistiwa (garis lintang 0°).

Provinsi Sumatera Barat mempunyai wilayah kerja administratif terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota yang terbagi dalam 152 kecamatan dan 546 nagari serta 336 kelurahan.

2. Gambaran Demografis Daerah

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan KB sebanyak 5.542.994 jiwa. "Dengan luas provinsi Sumatra Barat sekitar 42.125 kilometer persegi "Jumlah itu terdiri atas 2.791.543 laki-laki dan 2.751.451 perempuan, sedangkan sebaran penduduk Sumbar tercatat 73,10 persen berada di kabupaten dan 26,90 persen berada di kota,".Untuk Daerah Kota Padang dengan luas wilayah sebesar 686 km² yang terdiri dari 11 Kecamatan dan Jumlah Penduduk ± sebanyak 907.104 jiwa.

3. Indikator Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 adalah 69,47.

b. Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat adalah 344,23% dimana Kota Padang berjumlah 42,17%.

c. Angka Pengangguran

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Pada Agustus 2020, sebanyak 2581,52 % orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 6,88% orang menganggur.

4. Gambaran Umum Rumah Sakit

Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa.

Pada tahun 1932 di Padang terdapat dua tempat penampungan orang sakit jiwa. Lokasi pertama dibelakang Rumah Sakit Tentara di Parak Pisang (Sekarang Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryo) disebut sebagai *Doorganghuis voor Krankzinnigen*, dan ini merupakan bagian *Militaire Hospital* dan lokasi kedua ditempat RSJ sekarang, disebut sebagai Koloni Orang Sakit Djiwa (KOSD) Ulu Gadut. Di Ulu Gadut ini orang sakit jiwa melakukan kegiatan pertanian (sawah, ladang dan perkebunan). Setelah diresmikan berdiri pada tahun 1932 disebut Rumah Sakit Jiwa Parak Pisang, dan Ulu Gadut adalah tempat Koloni Orang Sakit Djiwa. Pada zaman Revolusi 1945 terjadi pengungsian orang sakit jiwa secara keseluruhan dari Parak Pisang ke KOSD Ulu Gadut karena situasi semakin tidak aman.

Pada 21 Januari 1947, waktu agresi Belanda terjadi lagi evakuasi / pengungsian karena situasi tidak aman lagi dari Ulu Gadut ke Sawah Lunto, menumpang dan bergabung dengan RSU Sawah Lunto (Pimpinan RSU waktu itu Dr.H.Hasan Basri Saanin Dt.Tan Pariaman) kemudian bernama Rumah Perawatan Sakit Jiwa (RPSD). Pada tahun 1954 dilakukan pembangunan kembali serta pemugaran bangsal-bangsal di Ulu Gadut dan pasien dikembalikan secara bertahap, dan KOSD diubah namanya menjadi Rumah Sakit Jiwa Ulu Gadut. Sejak tahun 1961 statusnya diubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Ulu Gadut Padang (kapasitas 110 tempat tidur) dan berakhir sampai tahun 2000. Berdasarkan SK Menkes-Kesos RI No 1732/Menkes-Kesos/2000 tanggal 12

Desember 2000, berubah lagi menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr.HB.Saanin Padang sampai sekarang.

Kemudian adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka RSJ menjadi UPTD Provinsi Sumatera Barat, sehingga tugas dan tanggung jawab berada dibawah Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Tahun 1978 - 2003 dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan RSJ mengacu pada SK Menkes RI No.135/Menkes/SK/IV/78 tanggal 28 April 1978 tentang SOTK RS Jiwa. Tahun 2003 - 2010 adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 tahun 2003 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Tahun 2010 terbit Perda No. 7 dan Pergub No.6 Tahun 2011 tentang SOTK RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan.

5. Profil Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang.

a. Keadaan Rumah Sakit Jiwa

- 1) Nama Rumah Sakit : R S. Jiwa Prof. H.B. Saanin Padang
- 2) Kelas Rumah Sakit : “ B “
- 3) Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar
- 4) Alamat : Jl. Raya Ulu Gadut
- 5) Kecamatan : Pauh
- 6) Kabupaten/ Kota : Padang
- 7) Provinsi : Sumatera Barat
- 8) No. Telp / Fax. : (0751) 72001 / (0751) 71379
- E-mail : rsjhbsaanin@yahoo.co.id
- Website : rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id
- 9) Jumlah Tempat Tidur : 273 TT
- 10) Jumlah Bangsal : 12 (Dua Belas) Unit + 1 Instalasi Napza
terdiri dari :
 - Anggrek (VIP & Kelas I) = 8 tt
 - Ruang Layanan Non Kekhususan
(Kelas I, II & III) = 15 tt

- Flamboyan (Kelas II)	= 25 tt
- Cendrawasih (Kelas III)	= 40 tt
- Melati (Kelas III)	= 35 tt
- Merpati (Kelas III)	= 40 tt
- Nuri (Kelas III)	= 35 tt
- Dahlia (Kelas III)	= 0 tt
- Gelatik (HCU Jiwa)	= 13 tt
- UPIP (ICU Jiwa)	= 8 tt
- Instalasi Napza (Kelas III)	= 20 tt
- Teratai (Klas I,II,III)	= 12 tt
- Anrem (Klas I,II,III)	= 10 tt
- Mawar (Non Kelas)	= 12 tt

11) Sarana dan Prasarana :

Luas Tanah	: 93.609 m ²
Luas Bangunan	: 19.680 m ²
Areal Parkir	: 1.742,5 m ²
Taman	: 3.227 m ²
Fasilitas Air	: Sumur Artesis dan PDAM
Fasilitas Listrik	: PLN dan Genset
Fasilitas Air Limbah	: IPAL 1 Unit

b. Ketenagaan : Jenis dan Jumlah Tenaga per Desember 2020

I	Jabatan struktural	PNS	Non PNS	PTT	Reveral	Ket
1	Direktur	-				
2	Wadir Direktur	2	0	0	0	
3	Ka.Bagian/Ka.Bidang	5	0	0	0	
4	Kasie/Kasubag	11	0	0	0	
	Jumlah	18				
II	Jabatan fungsional					
1	Dokter Spesialis	0	0	0	0	
2	Dokter Spesialis Jiwa	3	2	0	3	
3	Dokter Subspesialis Jiwa	0	0	0	1	
4	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi	0	0	0	1	
5	Dokter spesialis Neurologi	1	0	0	0	
6	Dokter spesialis anak	1	0	0	0	
7	Dokter Spesialis penyakit dalam	1	0	0	0	
8	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	0	0	
9	Dokter Spesialis Radiologi	0	0	0	1	
10	Dokter umum	9	1	0	0	
11	Dokter gigi	2	0	0	0	
12	Psikolog klinis	3	0	0	0	
13	Apoteker	4	3	0	0	
14	Asisten apoteker	9	2	0	0	
15	Perawat	98	45	0	0	
16	Perawat gigi	2	0	0	0	
17	Fisioterapis	2	0	0	0	
	Speechs Terapy	0	0	0	0	
	Okupasi Terapis	0	1	0	0	
18	Sanitarian	1	1	0	0	
19	Pranata Labor Kesehatan	7	2	0	0	
20	Penata Rontgen	1	0	0	0	
21	Rekam medis	6	3	0	0	
22	Teknis elektromedik	2	0	0	0	
23	Pekerja sosial	3	0	0	0	
24	Nutrisionis	5	0	0	0	
25	Pranata Komputer	1	2	0	0	
	Jumlah	161	62	0	6	
III	Administrasi					
	Jumlah	51	43	4	0	
IV	Pendidikan					
	Jumlah	3	0	0	0	
Jumlah Total		232	105	4	6	

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menilai hasil kinerja yang dicapai Rumah Sakit Jiwa mengacu pada Indikator dibawah ini sbb. :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS
2. AVLOS
3. Persentase (%) Pasien Non Jiwa yang ditangani Spesialis
4. Tingkat Kemandirian Keuangan
5. Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

d. Indikator Pelayanan Rumah Sakit Jiwa

Untuk menilai hasil kegiatan yang dicapai Rumah Sakit Jiwa mengacu pada Indikator / tolok ukur sbb. :

1. B O R (%)
2. L O S (hari)
3. B T O (kali)
4. T O I (kali)
5. N D R (%)
6. G D R (%)
7. Jumlah KJ Poliklinik (KP) (KJ)
8. Jumlah Pasien Masuk (orang)
9. Jumlah Pasien Dirawat (orang)
10. Jumlah Hari Perawatan (hari)
11. Jumlah Pasien Keluar/Pulang (orang)
12. Jumlah Hari Perawatan Pasien Keluar/Pulang (hari)

BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.1.1 Indikator Kinerja Outcome

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Kesehatan	1	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	$\frac{\text{jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi (4)}}{\text{jumlah RS rujukan provinsi (4)}} \times 100\%$	1,00	RSJ HB. Saanin	
		2	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{\text{jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun (5)}}{\text{jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam kurun waktu satu tahun yang sama (72)}} \times 100\%$	6,94		
		3	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	$\frac{\text{jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (72)}}{\text{jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi (5.550.000)}} \times 100\%$	0,0013		

Berdasarkan tabel indikator kinerja outcome diatas dapat kita simpulkan bahwa pada urusan kesehatan pemerintahan indikator kinerja kunci (IKK) outcome sebagai berikut :

1. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi dengan rumus perhitungan jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi yaitu 4 RS dibagi jumlah RS rujukan provinsi yaitu 4 RS dikali 100% capaian kinerjanya adalah 1,00%.
2. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dengan rumus perhitungan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun yaitu 5 (lima) orang dibagi jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 72 (tujuh puluh dua) orang dikali 100% capaian kinerjanya adalah 6,94%.
3. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi dengan rumus perhitungan jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standard yaitu 72 (tujuh puluh dua) dibagi jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada

situasi KLB provinsi 5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu) orang dikali 100% capaian kinerjanya adalah 0,0013%.

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Pengadaan	1	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang dilakukan melalui pengadaan (25.297.805.296) Total belanja langsung (27.352.954.364)	$\times 100$ %	92,48%	RS, Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
		2	Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar	Jumlah PNS yang berpendidikan PT ke atas (202) Jumlah PNS yang berpendidikan menengah/dasar (29)	$\times 100$ %	696,6%	RS, Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
2	Kepegawaian	3	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah	Jumlah pegawai PNS fungsional (159) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (18.864)	$\times 100$ %	0,84%	RS, Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
		4	Assets management	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak):		Ya	RS, Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
3	Manajemen Keuangan	5	Rasio anggaran SILPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA (2.583.157.514,66) Total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (55.615.307.257)	$\times 100$ %	4,67%	RS, Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Berdasarkan tabel indikator kinerja kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan diatas dapat kita simpulkan bahwa pada urusan kesehatan pemerintahan indikator kinerja kunci (IKK) outcome sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Pengadaan, indikator kinerja kunci (IKK) outcomenya adalah :
 - a. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan rumus perhitungannya adalah jumlah nilai belanja langsung yaitu 25.297.805.296,- dibagi total belanja langsung 27.352.954.364,- dikali 100% capaian kinerjanya adalah 92,48%.
2. Urusan Pemerintahan Kepegawaian, indikator kinerja kunci (IKK) outcomenya adalah:
 - a. Rasio PNS berpendidikan perguruan tinggi dibanding pendidikan menengah/dasar rumus perhitungannya adalah jumlah PNS yang berpendidikan PT ke atas yaitu 202 orang PNS dibagi jumlah PNS yang

berpendidikan menengah/dasar yaitu 29 orang PNS dikali 100% dengan pencapaian 696,6%.

- b. Persentase pegawai fungsional terhadap seluruh jumlah pegawai pemerintah daerah rumus perhitungannya adalah jumlah pegawai PNS fungsional yaitu 159 orang dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah 18.864 orang dikali 100% dengan pencapaian kinerja 0,84%.

3. Urusan Pemerintahan Manajemen keuangan, indikator kinerja kunci (IKK) outcomenya adalah :

- a. Asset managemen rumus perhitungannya adalah apakah ada daftar asset tetap? , apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?, apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? dan apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran dan semua jawabannya adalah YA.
- b. Rasio anggaran SILPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya rumus perhitungannya adalah nilai realisasi SILPA yaitu 2.583.157.514,66,- dibagi total belanja dalam APBD tahun sebelumnya yaitu 55.815.307.257,- dikali 100% dengan capaian kinerja 4,62%.

BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dalam hal ini tidak merupakan salah satu SKPD yang diberikan tanggung jawab untuk pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan

Rumah Sakit Jiwa Prof.HB.Saanin Padang mendapatkan tugas untuk menyelenggarakan urusan wajib kesehatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan RPJMD, Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Saanin Padang, mempunyai program dan kegiatan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1) Program :

- a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
- b) Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

2) Kegiatan :

a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS.Mata.

1. Pembangunan Asrama Diklat II
2. Pengembangan Selasar RS
3. Pembangunan Gedung Diklat
4. Pembangunan Rumah Dinas Eselon II
5. Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)
6. Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)
7. Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)

b) Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

1. Pelayanan BLUD RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal :

a) Tingkat Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
		2019	2020	%
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	86,07	93,84	104
AvLos	42 Hari	28 hari	26 hari	138
Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis	85%	98,43	89,07	105
Tingkat Kemandirian Keuangan	46%	59,21	47,96	104
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai BB (76%)	BB (75,22)	BB (79,15)	104

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja tahun 2020 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat targetnya adalah 90%, realisasi 93,84% dan persentase 104%, meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 85% dengan pencapaian 96,71%, Avlos (Average Length Of Stay) Standar RSJ < 42 Hari targetnya adalah 42 hari, realisasi 26 hari dan persentase capaian 138% menurun dari tahun sebelumnya, Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis targetnya 85%, realisasi 89,07% dengan persentase 105%, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RS target 46%, realisasi 47,96% dengan persentase 104%, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 59,21% dan Nilai evaluasi SAKIP target BB, realisasi BB (79,15) dengan persentase capaian 104%.

1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit

Kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan di RS.Jiwa Prof.HB Saanin Padang dengan 18 elemen indeks kepuasan yang sudah ditetapkan Kemenpan dapat diukur dengan melakukan survey kepuasan oleh Bidang Diklat dan Litbang RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang yang dilakukan rutin setiap tahunnya.

Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk menjaga hasil survey tetap valid, pihak rumah sakit menyerahkan pelaksanaan survey kepada pihak yang independen dalam hal ini diluar RS. Pada tahun 2020 ini survey dilakukan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Andalas Padang.

Realisasi IKM tahun 2020 adalah 93,84%. Bila dibandingkan dengan target nilai IKM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan (90%), maka dapat diketahui persentase capaian IKM tahun 2020 adalah sebesar 104%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Secara Nasional berdasarkan Permenpan & RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, nilai IKM RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang termasuk pada rentang nilai 88,31 – 100 dengan kategori **Sangat Baik**.

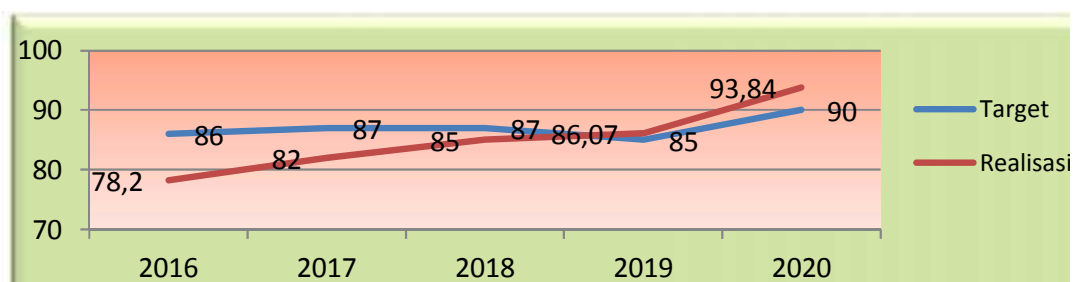
Pada tahun 2020 penilaian IKM dilakukan satu periode, yang dilakukan oleh tenaga independen (eksternal) dengan hasil rata rata 93,84 %.

Jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Pengukuran Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	78,2	87	82	87	85	85	86,07	90	93,84

Trend Perkembangan Nilai IKM dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2020 realisasinya meningkat dibandingkan Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana RS, meningkatnya edukasi kepada pasien dan keluarga, meningkatnya proses pemberian pelayanan, meningkatnya kenyamanan dan keamanan pengunjung, baik di pelayanan rawat jalan, rawat inap dan IGD.

Pencapaian IKM tahun 2020 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh rumah sakit diantaranya:

- a) Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan khususnya yang meningkatkan pelayanan Publik. Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 95.000.000 berasal dari dana RBA BLUD.
- b) Peningkatan sarana prasarana yang menunjang pelayanan dan pengembangan layanan RS sehingga dapat diakses lebih mudah oleh Masyarakat. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.278.500.881 berasal dari Belanja RBA BLUD dan Rp. 7.467.032.440 dari APBD.
- c) Pemberian informasi secara kontiniu kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (*leaflet, barner, running Teks*, media cetak maupun elektronik). Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut Rp. 66.300.000,- dari dana RBA BLUD.
- d) Peningkatan pelayanan dengan menggunakan Tekhnologi Informasi sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Biaya dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 230.180.000,- dari dana RBA BLUD.
- e) Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan ruangan pengaduan dan memperbanyak kotak pengaduan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhannya.

Sementara masih diperlukan perbaikan dan peningkatan tentang perilaku petugas dan sarana dan prasana pendukung pada poliklinik seperti :

- a) Kemudahan Persyaratan Pelayanan
- b) Kemudahan Prosedur Pelayanan
- c) Kerapian Petugas dalam memberikan pelayanan dengan memakai atribut yang lengkap
- d) Kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan
- e) Kesopanan dan keramahan satpam dalam memberikan pelayanan
- f) Lama waktu untuk meracik obat
- g) Pembangunan Sarana dan Prasarana di tempat layanan pasien rawat inap seperti : toilet umum untuk tamu dan penunjuk arah lokasi parkir tamu rawat inap
- h) Memperbaiki sarana pengaduan pelayanan kotak saran dan menyediakan pena dan kertas pengaduan
- i) Meletakkan papan informasi tentang jenis pelayanan pengaduan pada area yang mudah dibaca dan dilihat masyarakat.
- j) Jadwal pelayanan klinik dimulai tepat waktu
- k) Petugas farmasi memberikan informasi waktu penyelesaian obat kepada masyarakat

- l) Menambah loket layanan farmasi beserta petugasnya
- m) Memastikan jadwal visite dokter pada pasien rawat inap tepat waktu, sehingga tidak terlambat untuk melakukan layanan di klinik anak dan remaja, seperti klinik dewasa.

2). AvLOS

AvLOS (*Average Length of Stay*) atau angka rata-rata lama pasien dirawat adalah perbandingan jumlah lama pasien dirawat dengan jumlah pasien keluar baik hidup maupun mati. Dalam penilaian ini semakin kecil realisasi dari target yang telah ditetapkan maka dianggap pencapaian lebih baik.

$$AVLOS = \frac{\text{Jumlah Lama Pasien Dirawat}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup/Mati)}}$$

Adapun cara perhitungannya menggunakan Rumus :

$$AvLOS = \frac{2 \times \text{Target} - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

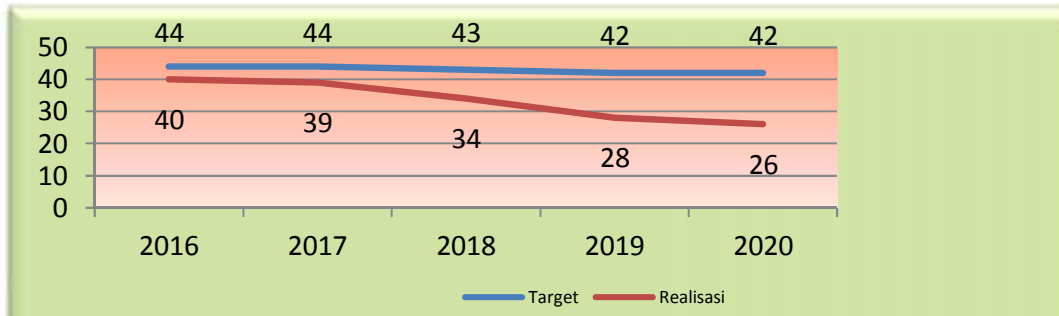
Realisasi AvLOS tahun 2020 adalah 26 Hari , Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 42 hari, maka dapat diketahui persentase capaian AvLOS tahun 2020 adalah sebesar 138%, ini berarti skala penilaiannya **Sangat Baik**. Sementara jika dibandingkan dengan target AvLOS yang ditetapkan Kemenkes untuk pasien jiwa sebesar 42 hari berarti capaian AvLOS pada tahun 2020 sudah dibawah target Nasional.

Bila dibandingkan dengan AvLOS tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Pengukuran Indikator Kinerja:
AvLOS (*Average Length of Stay*)

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	AvLOS (<i>Average Length of Stay</i>)	44	40	44	39	43	34	42	28	42	26

Trend Perkembangan AvLOS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi AvLOS Tahun 2020 dibawah target. Hal ini berarti pencapaiannya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Pencapaian tahun ini (26 hari) bila dibandingkan dengan tahun 2019 (28 hari), terdapat selisih 2 hari. Capaian tersebut dibawah dengan Standar Depkes untuk RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang idealnya 42 hari, realisasi 26 hari sehingga terdapat selisih 2 hari dari target. Hal ini disebabkan karena:

- a) Adanya koordinasi antara RS dengan Dinas Sosial Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga pasien yang ditanggung Dinas Sosial yang sudah dinyatakan boleh pulang oleh Dokter, bisa di pulangkan ke alamat keluarganya. Biaya dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 16.500.000 untuk pemulangan pasien dari dana RBA BLUD.
- b) Mengadakan pertemuan keluarga guna membantu dalam pemahaman keluarga untuk kebutuhan pasien pasca pulang.
- c) Melaksanakan *Clinical pathway* untuk 5 Diagnosa medis terbanyak yang membantu kendali mutu dan kendali biaya. Biaya untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 209.735.860,- untuk cetak rekam medis berasal dari dana RBA BLUD.

Untuk mempertahankan capaian tersebut RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang selalu melakukan upaya antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Sosial agar dapat menyiapkan tempat/panti/rumah singgah bagi pasien yang dinyatakan sudah dapat dipulangkan.
- b) Meningkatkan partisipasi keluarga dalam proses perawatan melalui pendidikan kesehatan kepada keluarga yang berkunjung ke Rumah Sakit.
- c) Menganggarkan kegiatan *dropping* pasien atau memulangkan pasien pada keluarganya terutama bagi keluarga miskin.
- d) Meningkatkan pelaksanaan Clinical Pathway menjadi 10 Diagnosa terbanyak untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya.

i. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima meliputi upaya kesehatan diluar psikiatri (Penyakit dalam, Syaraf, Anak, Gigi/Mulut dan Rehabilitasi Medik) baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya mutu pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima.

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis.

TUJUAN 1	SASARAN 1
Menurunnya Angka Kematian	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 4.4:

Tabel 4.4	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima
-----------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	85%	89,07%	104%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 4.3 menunjukkan bahwa realisasi pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2020 adalah 104% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Dari 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 2 (dua): hasilnya melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1) Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis

Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis adalah jumlah pasien non psikiatri (penyakit dalam, penyakit syaraf, anak, dan pelayanan gigi) yang ditangani oleh dokter spesialis dibanding dengan jumlah pasien non psikiatri yang datang berobat x 100.

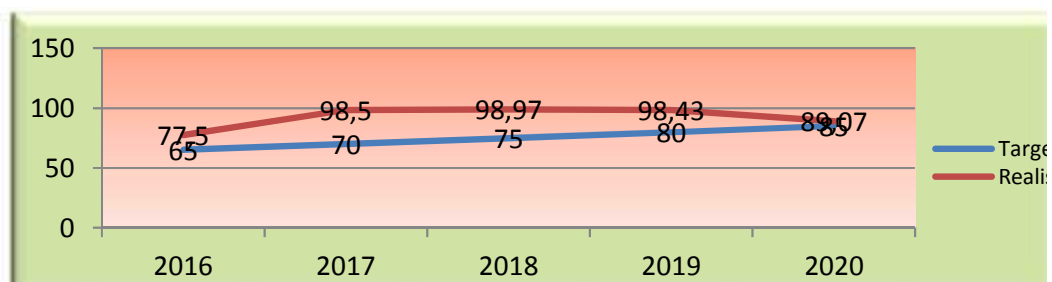
Realisasi Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2020 adalah 89,07%. Bila dibandingkan dengan target Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang yang telah ditetapkan (85%), ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun sebelumnya dapat dilihat dari table 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Pengukuran Indikator Kinerja:
Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	65	77,5	70	98,5	75	98,9	80	98,43	85	89,07

Trend Perkembangan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan hasil persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2020 realisasinya menurun dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang untuk Pelayanan di Poliklinik dilakukan oleh dokter spesialis dan adanya pandemi Covid-19 yang membuat menurunnya kunjungan pasien ke RS. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2016-2021 yaitu sebesar 90%, pencapaian Tahun 2020 kurang dari target Renstra dengan selisih sebesar 0.93%.

ii. Meningkatkan kemandirian Rumah Sakit

Tujuan Meningkatnya kemandirian Rumah Sakit menggambarkan kemampuan RS dalam melaksanakan tata kelola RS dan membiayai seluruh pengeluaran baik operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan RS, kemampuan dalam mengelola SDM dan tata kelola RS. Tujuan kedua dapat diukur dengan 2 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit.

a. Sasaran 1:

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Tingkat kemandirian keuangan RS (TKK)

Tujuan 1	Sasaran 1
Terwujudnya Rumah Sakit yang Mandiri	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 4.5	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)
-----------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)	46%	47,96%	104%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kemandirian keuangan di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada Tahun 2020 sebesar 104% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1) Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)

Tingkat Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator kinerja keuangan rumah sakit. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS membiayai seluruh biaya rumah sakit, dari pendapatan murni rumah sakit.

TKK adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan RS menutupi biaya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan pelayanan pasien (*Revenue*). TKK dihitung dari persentase perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya belanja rumah sakit dengan nilai idealnya diatas 40%.

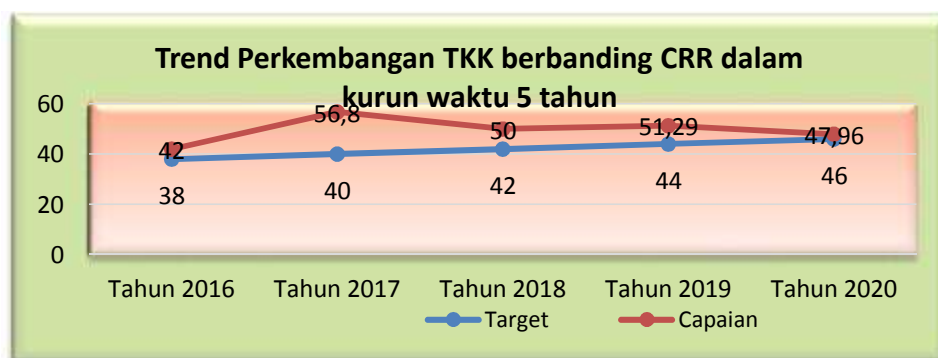
Realisasi TKK Tahun 2020 sebesar 47,96%, hal ini menunjukkan persentase capaian TKK Tahun 2020 adalah sebesar 104%. Dengan skala penilaian **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan TKK secara nasional adalah minimal 40%, TKK RS Jiwa Prof HB Saanin sudah berada pada rentang diatas standar minimal Nasional.

TKK merupakan indikator yang baru diperhitungkan mulai tahun 2016, namun demikian pada laporan ini sebagai pembanding tingkat capaian dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Pengukuran Indikator Kinerja:
Persentase (%)TKK

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	38	42	40	56,8	42	50	44	51,29	46	47,96

Trend Perkembangan TKK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa TKK tahun 2020 capaiannya bertambah dari Tahun 2019. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam klaim BPJS sehingga pendapatan Rumah Sakit tertunda. Selain itu terjadi penurunan jumlah pasien rawat jalan disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RSUD kelas D,C,B dan A.

Pencapaian TKK tahun 2020 dengan kategori **Sangat Baik** didukung oleh Pendapatan RS, Belanja APBD dan Belanja BLUD, diantaranya :

1. Target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 21.886.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.808.600.256,- dengan pencapaian 99,64%.
2. Belanja APBD dimana target belanja APBD sebesar Rp. 23.202.024.925,- terealisasi sebesar Rp. 22.573.980.218,- dengan persentase 97,29%. Kegiatannya diantaranya Belanja Tidak langsung (Gaji dan Tunjangan PNS), Belanja langsung (Pembangunan asrama diklat II, Pengembangan selasar RS, Pembangunan Gedung diklat, Pembangunan Rumah Dinas Eselon II, Pengadaan sarana perawatan bagi penderita akibat asap rokok (DBHCHT), Rehab Gedung instalasi radiologi, Rehab Gedung Instalasi Laundry).
3. Belanja BLUD target belanja Rp. 24.469.657.515,- realisasi Rp. 22.893.912.526,- dengan persentase capaian 93,56%, kegiatannya adalah peningkatan pelayanan BLUD RS.

b. Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola RS.

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Tujuan 1	Sasaran 1
Terwujudnya RS yang Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Rumah sakit

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pengukuran Kinerja Sasaran:
Meningkatnya Tatakelola Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB (76)	B (79,15)	104

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tata kelola di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2020 berdasarkan Nilai SAKIP sebesar 104% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

2) Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP.

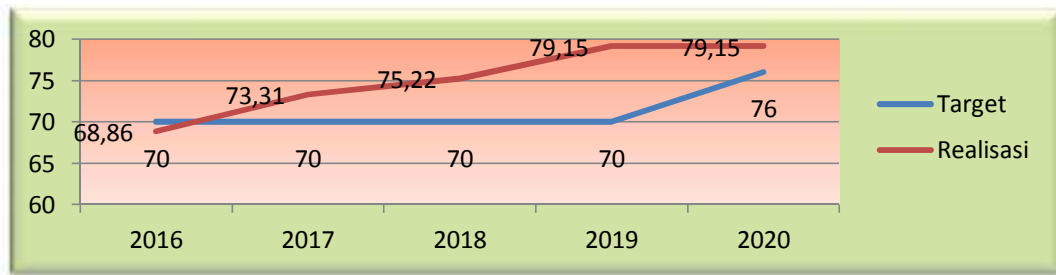
Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen: Komponen pertama adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Komponen kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran. Komponen ketiga adalah pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Komponen ke empat adalah evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi dan komponen ke lima adalah pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja lainnya.

Realisasi SAKIP tahun 2020 merupakan hasil penilaian dari LAKIP Tahun 2020 dengan nilai adalah BB (79,15). Bila dibandingkan dengan target nilai LAKIP RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan BB (76), maka dapat diketahui persentase capaian nilai LAKIP Tahun 2020 adalah sebesar 104%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Realisasi nilai LAKIP tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dari tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8 Pengukuran Indikator Kinerja:
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Evaluasi Sakip SKPD	70	68,86	70	73,31	70	75,22	70	75,22	76	79,15

Perkembangan Nilai LAKIP dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai LAKIP Tahun 2020 realisasinya masih sama dengan tahun 2019, berada pada kategori BB dengan nilai 79,15.

Pencapaian LAKIP pada tahun 2020 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit diantaranya:

- a) Melibatkan semua unsur bidang/ bagian untuk terlibat dalam perencanaan sehingga perencanaan menjadi suatu acuan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan.
- b) Melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk setiap triwulan sehingga dapat diantisipasi segala kendala dengan cepat.
- c) Melakukan pengukuran terhadap kinerja eselon III dan eselon IV.
- d) Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui e-SAKIP.

Untuk peningkatan penilaian LAKIP dimasa yang akan datang diperlukan:

1. Pengembangan IT dalam pengukuran kinerja
2. Melakukan analisis efisiensi program kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun.
3. Melakukan Revisi Renstra sesuai perubahan Perundang-undangan.
4. Melakukan perbaikan case canding terhadap Kinerja eselon II ke Eselon III dan Eselon IV.

b) Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD - RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG PROVINSI SUMATERA BARU						
No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	KK (FP 6/2008)	Target	Realisasi Capaian	Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	HOR (Bed Occupancy Rate)	60-85 %	65%	84%	54,07%	- Ada beberapa target yang belum tercapai
2	LOS (Length Of Stay)	30-52 Hari	40 Har	43 har	26,19	- Hal ini disebabkan
3	BTO (Bed Turn Over)	3-4 kali	3 kali	4 Kali	7,89 Kali	1. Masih ada kendala dalam Kaim BPJS sehingga pendapatan RS tertunda 2. Rujukan online berjenjang BPJS
4	TO (Turn Over Interval)	1-3 Hari	1 Hari	6 Hari	21,31 Hari	3. Penurunan Tipe Kelas RS
5	NDR (Net Death Rate)	-	-	0,79%	0,09%	4. Penurunan hasil penilaian Akreditasi
6	GDR (Gross Death Rate)	-	-	0,79%	0,14%	5. Terjadnya Pandemi Covid-19
7	Jumlah Hari Perawatan (HI ²)	-	-	88.000 Hari	53.040 Hari	Sehingga dengan adanya kendala-kendala seperti diatas maka rencana capaian tidak tercapai.
8	Jumlah Pasien Masuk	-	-	1500 org	2.063 org	RS Jiwa telah lulus akreditasi dan ISO. Perlu adanya Eksternal berkelanjutan
9	Jumlah Posisi Rawat Inap	-	-	1600 org	4.683 org	
10	Jumlah Pasien Keluar/Pulang	-	-	1500 org	2.114 org	
11	Jumlah Hari Perawatan Pasien Keluar/Pulang	-	-	65.000 Hari	55.373 Hari	
12	Jumlah Kunjungan Pasien (KP) Rawat Jalan	-	-	27.000 org	25.231 org	
13	Akreditasi Standar Pelayanan RS/ISO	-	-	ISO	ISO	

Berdasarkan tabel diatas terdapat indikator pelayanan yang masih belum sesuai target yaitu BOR, LOS, Jumlah hari perawatan, Jumlah hari perawatan pasien keluar/pulang dan Jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang penyebabnya adalah terjadinya pandemi covid-19, rujukan online berjenjang dari BPJS sehingga target belum dapat dicapai dan berakibat juga turunnya pendapatan RS.

c) Tingkat Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RS Jiwa Prof. HB.Saanin Padang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Gawat Darurat:

Dari 9 Indikator SPM, 8 indikator sudah mencapai target, sedangkan 1 indikator belum memenuhi target SPM yaitu kematian pasien < 24 Jam.

b. Pelayanan Rawat Jalan;

Dari 6 indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

c. Pelayanan Rawat Inap

Dari 13 indikator SPM, 9 indikator memenuhi target SPM, sedangkan 4 indikator belum memenuhi target SPM yaitu:

- 1) Jam Visite Dokter Spesialis dengan standar visite dilakukan jam 08.00 s/d 16.00 setiap hari kerja tercapai hanya 99,76% disebabkan karena pelayanan oleh dokter reveral di instalasi Rawat Inap dilakukan setelah jam pelayanan poliklinik.
- 2) Tidak adanya kejadian kematian pasien karena bunuh diri dengan target 100% sedangkan pencapaiannya hanya 95,4% dikarenakan masih adanya kejadian pasien jatuh diruang rawat inap yang disebabkan karena fasilitas yang belum memadai (seperti lantai rusak, dinding kamar mandi tanpa handrail, selokan tanpa grill).
- 3) Kejadian adanya rawat ulang (re-admission) pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan belum mencapai target hanya 95,71% terdapat deviasi 4,29% disebabkan oleh masih tingginya tingkat ketergantungan keluarga pada perawatan di rumah sakit, keluarga belum mampu merawat pasien dirumah karena kesibukan atau tidak adanya yang mengawasi pasien selama di rumah.
- 4) Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa standarnya adalah ≤ 6 minggu, pencapaian hanya 98,84% penyebabnya adalah masih adanya keluarga yang

belum bisa menjemput pasien, setelah diizinkan pulang oleh dokter, walaupun perawat diruangan telah menghubungi keluarga berulang kali. Selain itu, perawatan pasien dari rekomendasi Dinsos, sering didropping karena tidak ada keluarga (pasien terlantar).

d. Pelayanan Rehabilitasi Mental

Dari 4 Indikator SPM, 2 Indikator tercapai sesuai target, sedangkan 2 indikator belum tercapai yaitu Ketersediaan Pelayanan Rehabilitasi Mental minimal terapi aktivis capaiannya 90% dari target 100% penyebabnya adalah terapi pertukaran belum berjalan optimal karena belum adanya instruktur dan Kepuasan pelanggan pada instalasi rehabilitasi mental belum sampai target karena indikator ini belum optimal dikarenakan sarana dan prasarana yang banyak rusak dan tidak tersedia SDM dan fasilitas sesuai keterampilan pasien yang akan dilatih.

e. Pelayanan Psikologi

Dari 5 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

f. Pelayanan Forensik Psikiater

Dari 5 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

g. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Dari 2 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

h. Pelayanan Radiologi,

Dari 4 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

i. Pelayanan Laboratorium

Dari 4 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

j. Pelayanan Farmasi,

Dari 4 indikator SPM, 2 indikator tercapai sesuai target, sedangkan 2 indikator belum tercapai yaitu :

- 1) waktu tunggu pelayanan obat jadi (37 menit) penyebabnya adalah jaringan SIM RS bermasalah sehingga waktu tunggu pelayanan menjadi lama.

- 2) penulisan resep sesuai formularium 99,9% seharusnya 100% penyebabnya adalah masih terdapat dokter yang menuliskan resep yang tidak sesuai dengan formularium.

k. Pelayanan Gizi,

Dari 3 indikator SPM, semua indikator tercapai sesuai target.

l. Pelayanan Rekam Medis,

Dari 4 indikator SPM, semua indikator terpenuhi target.

m. Pelayanan pengelolaan limbah,

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target.

n. Pelayanan administrasi dan manajemen,

Dari 9 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM

o. Pelayanan ambulance/kereta jenazah

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Dari 1 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

q. Pelayanan laundry,

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

r. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit,

Dari 3 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

s. Pencegahan dan pengendalian infeksi,

Dari 3 indikator SPM, 3 indikator memenuhi target.

d) Pencapaian Indikator Program dan Kegiatan :

4.9 Tabel Pencapaian Indikator Program Tahun 2020

NO	Program	Indikator	Target	Realisasi	(%)
1	Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Persentase peningkatan standar sarana dan prasarana pelayanan	90%	80%	88,88
2	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Avlos (Average Lenght Of Stay) Standar RSJ < 43 Hari	42 Hari	26 Hari	138
		Respon Time IGD (<5 menit)	100%	100%	100%
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	90%	93,84%	104
		Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RS	46%	47,96%	104

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator program yang memenuhi target adalah; Persentase peningkatan standar sarana dan prasarana pelayanan sebesar 88,88%, Avlos (Average Lenght Of Stay) Standar RSJ < 42 Hari dengan persentase 138% dan Respon Time IGD (<5 menit) 100% dan Tingkat Kemandirian Keuangan RS sebesar 104% dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 104%.

e) Pencapaian Kegiatan APBD

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS Daerah/RS Jiwa/RS Mata/RS Paru.

a. Pembangunan Asrama Diklat II

Pembangunan Asrama diklat II tidak jadi terlaksana karena *recoffusing* anggaran untuk penanganan pandemic covid-19.

b. Pembangunan Selasar Rumah Sakit

Dari ketersediaan dana APBD untuk Pembangunan Selasar Rumah Sakit Lanjutan Rp.400.000.000,- terealisasi sebesar Rp.309.492.544,- dengan pencapaian (Keuangan= 77,37% Fisik= 100%). Permasalahan tidak ditemukan bahwa hasil pekerjaan kegiatan Pembangunan Selasar RS selesai sesuai dengan kontrak, efisiensi anggaran senilai Rp. 50.507.456 pada pengelola kegiatan. Pekerjaan Pembangunan Selasar Rumah Sakit selesai 100% pada tahun 2020.

c. Pembangunan Gedung Diklat

Pembangunan Gedung Diklat tidak jadi terlaksana karena *recoffusing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.

d. Pembangunan Rumah Dinas Eselon II

Dari ketersediaan dana APBD untuk Pembangunan Rumah Dinas Eselon II Rp. 1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 830.707.397,- dengan pencapaian (Keuangan = 83,07 %, Fisik = 100%). Hasil pekerjaan kegiatan sudah selesai sesuai dengan kontrak sehingga tercapai fisik 100% pembayaran sesuai dengan kontrak, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 169.292.603 pada pengelola kegiatan dan perjalanan dinas. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembangunan sarana Rumah Dinas Eselon II.

e. Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

Dari ketersediaan dana APBD untuk Dokumen Pengadaan Sarana Perawatan bagi Penderita Akibat Asap Rokok (DBHCHT) RS sebesar Rp. 386.668.346,- terealisasi sebesar Rp. 343.296.537,- dengan pencapaian (Keuangan = 88,78 %, Fisik = 100%) Fisik sudah tercapai 100% tidak ada kendala secara prinsip tidak perlu upaya penanganan dalam kegiatan ini karena secara fisik kegiatan sudah terlaksana dengan baik dengan tersedianya alat kesehatan 12 unit dan belanja barang dan jasa 3 paket, efisiensi anggaran sebesar Rp. 43.371.809. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana alat kesehatan untuk menunjang pelayanan di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.

f. Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)

Dari ketersediaan dana APBD untuk Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK) Rp. 572.510.000,- terealisasi sebesar Rp. 496.317.295,- dengan pencapaian (Keuangan = 86,69 %, Fisik = 100%). Hasil pekerjaan kegiatan sudah selesai sesuai dengan kontrak sehingga tercapai fisik 100% pembayaran sesuai dengan kontrak, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 76.192.705,-. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembangunan sarana RS.

g. Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)

Dari ketersediaan dana APBD untuk Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK) Rp. 524.118.503,- terealisasi sebesar Rp. 424.078.997,- dengan pencapaian (Keuangan = 80,91 %, Fisik = 100%). Hasil pekerjaan kegiatan sudah selesai sesuai dengan kontrak sehingga tercapai fisik 100% pembayaran sesuai dengan kontrak, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 100.039.506,-. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembangunan sarana RS.

1. Realisasi Fisik dan Keuangan BLUD

a. Pendapatan Pelayanan BLUD

RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan SKPD dengan PPK BLUD sehingga pendapatan dihasilkan dari Pelayanan BLUD dan pendapatan lain yang sah, Target pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp. 21.886.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.808.600.256,- dengan pencapaian 99,64%. Berdasarkan hal tersebut maka Rasio Efektifitas dari kinerja keuangan termasuk kategori **baik**. Pendapatan tidak mencapai target sehingga terjadi defisit, karena masih adanya kendala dari klaim BPJS sehingga pendapatan RS tertunda. Selain itu juga disebabkan oleh terjadinya penurunan klas RS, jumlah pasien rawat jalan yang disebabkan oleh mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RS kelas D,C,B dan A dan karena terjadinya pandemi covid-19 sehingga pendapatan rumah sakit belum mencapai target.

b. Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

a) Kegiatan Pelayanan BLUD

Dari target anggaran BLUD untuk kegiatan pelayanan BLUD sebesar Rp.24.469.657.515,- terealisasi sebesar Rp. 22.893.912.526,- dengan pencapaian (Keuangan = 93,56%, Fisik =100%). Kegiatan tercapai fisik 100%, realisasi anggaran pembayaran sesuai kegiatan, terdapat efisiensi anggaran. Dampak dari kegiatan pelayanan BLUD ini adalah berpengaruh besar pada capaian indikator kinerja utama yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 93,84%, menurunnya Avlos dari 42 hari menjadi 26 hari dan Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) 47,96%. Meningkatnya pelatihan pada petugas RS, meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS, tercapainya kalibrasi alat kesehatan tepat waktu, disamping terwujudnya pelayanan promosi kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan disiplin aparatur.

A. Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua)

IKK, yaitu :

1) Program Nasional Bidang Kesehatan sebanyak 5 Program dan dilaksanakan di SKPD sebanyak 1 Program dengan Capaian Kinerja sebesar 20 %.

Program Nasional pada urusan Kesehatan ada 5 (lima), yang terdiri dari:

- a) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru/ RS Mata
- b) Program Pelayanan Kesehatan bagi pasien gangguan jiwa terlantar.
- c) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- d) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba
- e) Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

Program Nasional yang dilaksanakan pada SKPD RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang adalah Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru/ RS Mata dan Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD.

2) Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) dengan Capaian Kinerja Ada, yaitu sebanyak 65 SOP yang terbagi atas :

- Prosedur Pokok pelayanan 15 SOP.
- Prosedur Peningkatan pelayanan 12 SOP.
- Prosedur Pendukung pelayanan 38 SOP.

b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, yaitu :

Jumlah Perda pelaksanaan PERMEN ada sebanyak 3 (tiga) yaitu :

1. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 7 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

c. Penataan Kelembagaan Daerah, terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:

- 1) Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 18 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 21 Jabatan, Capaian Kinerja 85,71%
- 2) Jabatan Fungsional dalam struktur SKPD ada :

Bidang/Bagian :

1. Bidang Pelayanan Medis
2. Bidang Keperawatan
3. Bidang Penunjang Medis
4. Bidang Pendidikan & Latihan, Penelitian dan Pengembangan
5. Bagian Tata Usaha
6. Bagian Keuangan

Kepala Instalasi :

1. Kepala Instalasi Rawat Inap A
2. Kepala Instalasi Rawat Inap B
3. Kepala Instalasi Rawat Jalan
4. Kepala Instalasi Gawat Darurat
5. Kepala Instalasi Rekam Medis
6. Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik
7. Kepala Instalasi Rehabilitasi Mental.
8. Kepala Instalasi Keswamas
9. Kepala Instalasi Napza

10. Kepala Instalasi Radiologi
11. Kepala Instalasi Laboratorium
12. Kepala Instalasi Farmasi
13. Kepala Instalasi Gizi
14. Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS
15. Kepala Instalasi Laundry & Pemulasaran Jenazah
16. Kepala Instalasi Anak dan Remaja
17. Kepala Instalasi Casemix
18. Kepala Instalasi SIM dan TI

Jabatan Fungsional

1. Dokter Madya
2. Dokter Muda
3. Dokter Pertama
4. Dokter Gigi Madya
5. Apoteker Utama Madya
6. Apoteker Madya
7. Apoteker Muda
8. Asisten Apoteker Penyelia
9. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan
10. Asisten Apoteker Pelaksana
11. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula
12. Psikolog Klinis Madya
13. Psikolog Klinis Muda
14. Psikolog Klinis Pertama
15. Perawat Ahli Madya
16. Perawat Ahli Muda
17. Perawat Ahli Pertama
18. Perawat Penyelia
19. Perawat Pelaksana Lanjutan
20. Perawat Pelaksana
21. Perawat Gigi Penyelia
22. Nutrisisionis Muda
23. Nutrisisionis Pertama
24. Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan
25. Nutrisisionis Pelaksana

26. Pekerja Sosial Madya
27. Pekerja Sosial Penyelia
28. Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan
29. Perekam Medis Penyelia
30. Perekam Medis Pelaksana
31. Fisioterapi Ahli
32. Sanitarian Ahli
33. Teknisi Elektromedik Terampil
34. Pranata Labor Kesehatan Penyelia
35. Pranata Labor Kesehatan Pelaksana Lanjutan
36. Pranata Labor Kesehatan Pelaksana
37. Pranata Komputer
38. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda

d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :

- 1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat sebanyak 232 Personil dari Total PNS di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 18.864 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 1,22 %.
- 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 12 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 18, dengan Capaian Kinerja sebesar 66,66%;
- 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 18 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 18, Capaian Kinerja sebesar 100%;

e. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :

- 1) Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang berupa Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, RBA BLUD dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 8 jenis;
- 2) Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 5 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 5, capaian kinerja sebesar 100 %.
- 3) Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD ada 5 (lima), yang terdiri dari :
 - a) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru/ RS Mata
 - b) Program Pelayanan Kesehatan bagi pasien gangguan jiwa terlantar.

- c) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- d) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba.
- e) Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

Program yang diakomodir didalam Renja SKPD ada 5, yang terdiri dari :

- a) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru/ RS Mata
 - b) Program Pelayanan Kesehatan bagi pasien gangguan jiwa terlantar.
 - c) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - d) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba
 - e) Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD
- 4) Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100 %.
- 5) Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100 %.

f. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK, yaitu:

- 1) Anggaran SKPD sebesar Rp.47.671.682.440,- dari Total APBD sebesar Rp.2.883.296.849,- capaian kinerja sebesar 6,04%;
- 2) Belanja Modal SKPD Rp.2.996.628.503,- dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 45.467.892.744,- capaian kinerja 6,59%;
- 3) Belanja Pemeliharaan Rp. 680.680.832,- dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 22.893.912.526,- capaian kinerja sebesar 2,97 %;
- 4) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 680.680.832,- dari Total Belanja SKPD Rp. 45.467.892.744,- capaian kinerja sebesar 1,49 %;
- 5) Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK, LO dengan capaian kinerja Ada, dan sebanyak 4 jenis ;

g. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :

- 1) Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris, Buku Penerimaan dan Pengeluaran, Daftar Pemeliharaan, Catatan Mutasi Barang,

Daftar Aset Kontabel, Daftar Aset Tetap, Daftar Aset Lainnya, Daftar Barang Persediaan dan Daftar Penghapusan Barang;

- 2) Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD 0 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar 4.313 Capaian Kinerja sebesar 100 %.

h. Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :

- 1) Jumlah Fasilitas / Prasarana Informasi sebanyak 11 Jenis Informasi;
 1. Papan Pengumuman
 2. Leaflet
 3. Billboard
 4. Baner
 5. Spanduk
 6. Runing Text
 7. Pos Pengaduan
 8. TalkShow Media Elektronik
 9. Talkshow Radio
 10. Pengumuman dan Berita media cetak
 11. Runing Teks Media Elektronik
- 2) Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat, Ada yaitu dengan Survey Kepuasan Masyarakat melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pasien/keluarga di setiap unit pelayanan (sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 14 Tahun 2017 yang selanjutnya direkap untuk mendapatkan angka IKM.

Penilaian IKM dengan menggunakan indikator mutu pelayanan:

- A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00
- B (Baik) : 76,61 – 88,30
- C (Kurang baik) : 65,00 – 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99

Berdasarkan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 diperoleh hasil nilai 93,84% yang artinya berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mutu pelayanan di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

4. Jumlah PNS RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2020.

a. Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Personal
1.	S.2	12 orang
2.	Spesialis	7 orang
3.	S.1	101 orang
4.	D.IV	3 orang
5.	D.III	79 orang
6.	SLTA	27 orang
7.	SLTP	1 orang
8.	SD	1 orang
J u m l a h		232 orang

b. Pangkat / Golongan

No.	Golongan	Jumlah Personal
1.	IV.d	1 orang
2.	IV.c	2 orang
3.	IV.b	5 orang
4.	IV.a	22 orang
5.	III.d	43 orang
6.	III.c	33 orang
7.	III.b	38 orang
8.	III.a	54 orang
9.	II.d	13 orang
10.	II.c	20 orang
11.	II.b	0 orang
12.	II.a	0 orang
13.	I.d	1 orang
J u m l a h		232 orang

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Komposisi Pegawai	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	18 orang
2.	Pejabat Fungsional tertentu	159 orang
3.	Pejabat Fungsional umum	52 orang
4.	Pendidikan	3 orang
J u m l a h		232 orang

d. Jumlah Pegawai dilihat dari jenis Jabatan Fungsional tertentu

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Tenaga Medis	16 orang
2	Apoteker /Asisten Apoteker	13 orang
3	Psikologi	3 orang
4	Perawatan	100 orang
5	Pekerja Sosial	3 orang
6	Gizi	5 orang
7	Laboratorium	7 orang
8	Rekam Medik	6 orang
9	Fisioterapi	2 orang
10	Elektro Medik	2 orang
11	Radio Grafer	0 orang
12	Admin Kes	0 orang
13	Sanitasi	1 orang
14	Pranata Komputer	1 orang
Jumlah		159 orang

e. Jenis Jabatan Fungsional Berdasarkan Bagian dan Bidang RS Jiwa Prof. HB.

Saanin Padang

1) Bidang Pelayanan :

- 1) Dokter Spesialis Kejiwaan
- 2) Dokter Spesialis Syaraf
- 3) Dokter Umum
- 4) Dokter Gigi
- 5) Psikolog Klinis
- 6) Fisioterapis.
- 7) Rekam Medik
- 8) Terapi Wicara
- 9) Okupasi Terapi

2) Bidang Perawatan :

Perawat

- 1) Perawat Gigi
- 2) Pekerja Sosial

- 3) Bidang Penunjang :
- 1) Apoteker
 - 2) Asisten Apoteker
 - 3) Analis Kesehatan
 - 4) Radiografer
 - 5) Sanitarian
 - 6) Teknis Elektromedis
 - 7) Nutrisionis

F. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN APBD (BELANJA LANGSUNG) TAHUN ANGGARAN 2020

REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD TA. 2020									
SKPD : RS Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG									
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET KUALITATIF		ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI			
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit / RS. Khusus / RS Mata				2.883.296.849		2.403.892.770	83,37	
1	Pembangunan Asrama Diklat II	Padang	100%	95%		0%			
2	Pengembangan Selasar Rumah Sakit	Padang	100%	95%	400.000.000	100%	309.492.544	77,37	
3	Pembangunan Gedung Diklat	Padang	100%	95%		0%			
4	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Padang	100%	95%	1.000.000.000	100%	830.707.397	83,07	
5	Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DHICIT)	Padang	100%	95%	386.668.346	100%	343.296.537	88,78	
6	Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)	Padang	100%	95%	572.510.000	100%	496.317.295	86,69	
7	Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)	Padang	100%	95%	524.118.503	100%	424.078.997	80,91	
II	Program peningkatan pelayanan BLUD				24.469.657.515		22.893.912.526	93,56	
1	Pelayanan BLUD	Padang	100%	95%	24.469.657.515	95%	22.893.912.526	93,56	
JUMLAH BELANJA					27.352.954.364	99%	25.297.805.296	92,49	

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA. 2020

SKPD : RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

NO	URAIAN	LOKASI	TARGET KUALITATIF		ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA TIDAK LANGSUNG							
1	GAJI DAN TUNJANGAN PNS	PADANG	100%	95%	15.296.177.451	100%	15.151.030.302	99,05
2	TAMBAHAN PENGIHASILAN PNS	PADANG	100%	95%	5.022.550.625	100%	5.019.049.146	99,93
	JUMLAH BELANJA				20.318.728.076		20.170.087.448	99,27

REALISASI BELANJA APBD TA. 2020

SKPD : RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

NO	URAIAN	LOKASI	TARGET KUALITATIF		ANGGARAN TAHUN 2019	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PADANG	100%	95%	20.318.728.076		20.170.087.448	99,27
II	BELANJA LANGSUNG	PADANG	100%	95%	27.352.954.364		25.297.805.296	92,49
	TOTAL BELANJA				47.671.682.440		45.467.892.744	95,38

G. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan yang ada pada Rumah Sakit Jiwa selama ini adalah sbb:

- 1) Masih adanya kendala dalam klaim BPJS sehingga pendapatan RS tertunda.
- 2) Belum optimalnya kepedulian dan pengetahuan dari SDM khususnya tenaga profesional dan tingginya tuntutan masyarakat yang mengharuskan SDM selalu mengembangkan diri.
- 3) Peralatan Kedokteran yang ada belum memenuhi standar pelayanan dan disamping itu juga sudah banyak peralatan kedokteran yang rusak berat, begitu juga alat kesehatan Non Medis perlu penambahan dan penggantian yang rusak.
- 4) Berdasarkan Surat Edaran dari BPJS Kesehatan bulan Juli tahun 2018 tentang Rujukan Online mengakibatkan jumlah pasien rawat jalan menurun dalam 2 bulan terakhir, hal ini disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RSUD kelas D,C,B,dan A. Klaim BPJS Kesehatan baru dibayarkan sampai bulan Agustus 2020.
- 5) Terjadinya penurunan Tipe kelas Rumah Sakit dari A ke B pada tahun 2019 yang berpengaruh pada tarif pelayanan sehingga pendapatan Rumah Sakit juga berkurang sebesar 60% dari kelas A.
- 6) Predikat hasil penilaian akreditasi RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang versi SNARS Edisi 1 berada pada tingkat Dasar, ini menurun dimana sebelumnya RS.Jiwa Prof.HB.Saanin padang berada di tingkat Paripurna.
- 7) Terjadinya pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.

b. Solusi yang dilakukan Rumah Sakit Jiwa adalah :

- a. Dalam melakukan pelayanan bekerja sama dengan tenaga spesialis RS Dr. M.Djamil Padang, begitu juga Spesialis Penyakit Dalam (Internis), Spesialis Anak, Radiologi dari luar, untuk pelayanan lainnya mengoptimalkan SDM yang ada.
- b. Adanya tenaga dokter spesialis yang kembali ke RS setelah menyelesaikan pendidikannya.
- c. Untuk pemenuhan tenaga perawat dan ADM dilakukan perekrutan tenaga CPNS pada tahun 2019.

- d. Mengupayakan perbaikan semua fasilitas pelayanan dilingkungan rumah sakit, serta mengoptimalkan pemakaian peralatan kesehatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
- e. Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi pendapatan RS menurun sehingga langkah yang diambil yaitu dengan mengoptimalkan belanja operasional RS yang tersedia dan mengutamakan belanja operasional yang lebih prioritas/*urgent*.
- f. RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang mengusulkan remedi pada awal bulan maret 2020 untuk dilakukan survey penilaian kembali oleh tim KARS akan tetapi terhalang karena pandemi covid-19 sampai waktu yang belum bisa ditentukan.

BAB V.PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan Renstra, Program, Visi & Misi Rumah Sakit Jiwa yang kemudian dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan maka secara umum dapat dinilai cukup meningkat dari tahun ke tahun walaupun Sarana dan Prasarananya belum lengkap dan masih ada kekurangan-kekurangannya. Kekurangan sarana dan prasarana dimaksud akan dilaksanakan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra RS Tahun 2016- 2021.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya tenaga-tenaga yang terampil dan profesional sesuai kuantitas kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit.
2. Adanya dukungan fasilitas yang memadai agar kegiatan dapat berjalan dengan optimal dan memuaskan.
3. Pengembangan pelayanan unggulan subspesialistik, pengembangan pelayanan unggulan penyalahgunaan dan ketergantungan Napza (sebagai pilot proyek penanganan rehabilitasi Napza kerja sama dengan Pengadilan, Kepolisian dan BNN) dan juga pengembangan pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit, sesuai dengan Visi dan Misi. Maka perlu adanya dukungan dana yang memadai sehingga pelayanan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Sumatera Barat.
4. Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi pendapatan RS menurun sehingga langkah yang diambil yaitu dengan mengoptimalkan belanja operasional RS yang tersedia dan mengutamakan belanja operasional yang lebih prioritas/*urgent*.

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2020

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NAMA SKPD : RS Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB KESEHATAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	20%	Lihat Program Nasional RKP 2020 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 65 SOP yang terdiri dari: 1. PPK = 15 SOP 2. PIN = 12 SOP 3. PPD = 38 SOP SOP PKK : 1. Penerimaan dan pelayanan pasien di BLUD Prof.HB. Saanin Padang 2. Penerimaan Surat Keterangan Sehat Jiwa, Visum ET Revertum Psikiatrikum dan Assesmen NAPZA 3. Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat 4. Pemulangan pasien (Dropping)	Ada SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						5. Terapi Aktifitas Kelompok 6. Interaksi dengan keluarga 7. Interaksi dengan pasien 8. Pasien pindah ruangan 9. Pelayanan Pasien Rehabilitasi 10. Pengiriman Pasien Rehabilitasi 11. Pemeriksaan Laboratorium Pasien 12. Pelayanan Radiologi Pasien 13. Pengelolaan perbekalan Farmasi 14. Pengelolaan Rekam Medik 15. Pendistribusian Perbekalan Farmasi SOP PIN : 1. Pengendalian Dokumen 2. Pengendalian Rekaman 3. Audit Internal 4. Pengendalian Produk tidak sesuai 5. Tindakan Koreksi 6. Tindakan Pencegahan 7. Rapat Tinjauan Manajemen 8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 9. Pengukuran Kepuasan SDM terhadap pengelolaan SDM 10. Pengelolaan Rapat-rapat Dinas 11. Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian, dan Akses data dan informasi 12. Pengukuran Kepuasan		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Pelayanan Publik. SOP PPD : 1. Pemeliharaan Alat Medis 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Non-Medis) 3. Pengelolaan Pelaksanaan Teknis Kegiatan 4. Pendistribusian Makanan Pasien 5. Pengelolaan Linen 6. Pengelolaan Pemulasaran Jenazah 7. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan 8. Penyusunan Anggaran APBD 9. Penyusunan Anggaran BLUD 10. Penerimaan Pendapatan BLUD 11. Pengeluaran Keuangan Anggaran APBD 12. Pengeluaran Keuangan Anggaran BLUD 13. Penyusunan Laporan Pengeluaran Keuangan APBD 14. Penyusunan Laporan Pengeluaran Keuangan BLUD 15. Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan 16. Penyusunan Laporan Keuangan dan Akuntansi 17. Pengelolaan Kerjasama dengan pihak/instansi terkait		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						18. Kenaikan Pangkat Pegawai 19. Pemberian Cuti Pegawai 20. Disiplin Pegawai 21. Kenaikan Gaji Berkala 22. Penilaian Prestasi Kerja 23. Izin dan Tugas Belajar 24. Pengelolaan Barang 25. Pengelolaan Aset 26. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 27. Pengelolaan Kendaraan Dinas 28. Pengelolaan Rumah Dinas 29. Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Umum 30. Pengelolaan Praktek Mahasiswa Keperawatan 31. Pengelolaan Praktek Mahasiswa Non-Medis/Non Keperawatan 32. Pengelolaan Magang, Studi banding dan Kunjungan Kerja 33. Pengelolaan Penelitian 34. Pengelolaan Asrama 35. Pengawasan Internal 36. Pengaduan Pelanggan 37. Prosedur Pelatihan/Seminar/Workshop /Bimtek/Sosialisasi 38. Penilaian Angka Kredit		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus	- PERDA pelaksanaan sebanyak 5 - PERDA yang seharusnya,	100%	1. Perda SOTK 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	UNDANG-UNDANGAN	Menteri (PERMEN)		terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	sebanyak 5		Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 18 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	85,71 %	
5			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, <u>Bidang/Bagian :</u> 1. Bidang Pelayanan Medis 2. Bidang Keperawatan 3. Bidang Penunjang Medis 4. Bidang Pendidikan & Latihan, Penelitian dan Pengembangan 5. Bagian Tata Usaha 6. Bagian Keuangan <u>Kepala Instalasi :</u> 1. Kepala Instalasi Rawat Inap A	ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2020.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						2. Kepala Instalasi Rawat Inap B 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Kepala Instalasi Gawat Darurat 5. Kepala Instalasi Rekam Medis 6. Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik 7. Kepala Instalasi Rehabilitasi Mental. 8. Kepala Instalasi Keswamas 9. Kepala Instalasi Napza 10. Kepala Instalasi Radiologi 11. Kepala Instalasi Laboratorium 12. Kepala Instalasi Farmasi 13. Kepala Instalasi Gizi 14. Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS 15. Kepala Instalasi Laundry & Pemulasaran Jenazah 16. Kepala Instalasi Anak dan Remaja 17. Kepala Instalasi Casemix <u>Jabatan Fungsional</u> 1. Dokter Madya 2. Dokter Muda 3. Dokter Pertama 4. Dokter Gigi Madya 5. Apoteker Utama Madya 6. Apoteker Madya 7. Apoteker Muda 8. Asisten Apoteker Penyelia 9. Asisten Apoteker Pelaksana		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Lanjutan 10. Asisten Apoteker Pelaksana 11. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula 12. Psikolog Klinis Madya 13. Psikolog Klinis Muda 14. Psikolog Klinis Pertama 15. Perawat Ahli Madya 16. Perawat Ahli Muda 17. Perawat Ahli Pertama 18. Perawat Penyelia 19. Perawat Pelaksana Lanjutan 20. Perawat Pelaksana 21. Perawat Gigi Penyelia 22. Nutrisionis Muda 23. Nutrisionis Pertama 24. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan 25. Nutrisionis Pelaksana 26. Pekerja Sosial Madya 27. Pekerja Sosial Penyelia 28. Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan 29. Perekam Medis Penyelia 30. Perekam Medis Pelaksana 31. Fisioterapi Ahli 32. Sanitarian Ahli 33. Teknisi Elektromedik Terampil 34. Pranata Labor Kesehatan Penyelia 35. Pranata Labor Kesehatan Pelaksana Lanjutan 36. Pranata Labor Kesehatan Pelaksana		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						37. Pranata Komputer 38. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda		
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 232 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 18.864 personil	1,22 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ updated Tahun 2020.
	7		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	66,66%	Mengacu kondisi terakhir/ updated Tahun 2020. Yang Belum : PIM III 4 Orang PIM IV 8 Orang	
	8		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 18 jabatan.	100%	Mengacu kondisi terakhir/ updated Tahun 2020.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 8 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra-RSJ 2016-2021 2. Renja RSJ Th 2020 3. RKT RSJ Th 2020 3. Penetapan Kinerja RSJ Th 2020 4. RKA-RSJ RSJ Th 2020 5. DPA RSJ Th 2020 6. DPA Perubahan RSJ Th 2020	8 jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					7. RBA BLUD Th 2020 8. RBA Perubahan BLUD Th 2020		
	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS Paru/RS Mata 2. Program Pelayanan Kesehatan bagi pasien gangguan jiwa terlantar 3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4. Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba 5. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengadaan 	100%	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2020 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS Paru/RS Mata 2. Program Pelayanan Kesehatan bagi pasien gangguan jiwa terlantar 3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba 5. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA yang SKPD diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 1. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS Paru/RS Mata 2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 1. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS Paru/RS Mata 2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2020 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 1. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS Paru/RS Mata 2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 1. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS Paru/RS Mata 2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD 	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2020 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2020.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 47.671.682.440,- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.883.296.849,- 	6,04 %	Mengacu APBD Perubahan tahun 2020.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.996.628.503.- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 45.467.892.744,- 	6,59 %	Mengacu APBD Perubahan tahun 2020.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.680.680.832,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.893.912.526,-	2,97 %	Mengacu RBA Perubahan BLUD tahun 2020 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 680.680.832,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 45.467.892.744,-	1,49 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Calk-SKPD 2. Neraca 3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 4. Laporan Operasional (LO)	Ada sebanyak 4 jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK, LO)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Barang 2. Kartu Inventaris Ruangan 3. Buku Inventaris 4. Buku Penerimaan dan Pengeluaran 5. Daftar Pemeliharaan 6. Catatan Mutasi Barang 7. Daftar Aset Kontabel 8. Daftar Aset Tetap 9. Daftar Aset Lainnya 10. Daftar Barang Persediaan 11. Daftar Penghapusan Barang	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 4.313 asset. 	100 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman diMass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Billboard 4. Baner 5. Spanduk 6. Runing Text 7. Pos Pengaduan 8. TalkShow Media Elektronik 9. Pengumuman dan Berita media cetak 10. Runing Teks Media Elektronik	Jumlah sebanyak 12 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai Kepmen PAN nomor 14 Tahun 2017, dengan nilai 93,84% dengan penilaian SANGAT BAIK.	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Internal dan Eksternal dengan bekerjasama dengan LPPM Unand Padang.